

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DESA JATISEENG KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON

Aditiya Albar¹⁾, Muhamad Taufikurrohman²⁾, Rochmat Hidayat³⁾
Universitas Muhammadiyah Cirebon

elalbaralmachzumi@gmail.com¹⁾, Taufikrahmanoman@gmail.com²⁾,
rochmat.hidayat@umc.ac.id³⁾

Abstract

Social inequality is a social condition that exists in society which results in a striking difference between one community and another, so the government is trying to reduce poverty. One of the objectives of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is to reduce the burden of spending on community food needs and to provide balanced nutrition to beneficiary families (KPM) in an appropriate and timely manner. The research objective was to determine the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Jatiseeng Village, Ciledug District, Cirebon Regency. This research method uses descriptive research with a qualitative approach, research that is used to understand the phenomena that occur in research subjects. Research informants are subjects who understand research object information as actors and other people who understand research objects. Methods of data collection in this study using observation and interview methods. . Then analyzed according to data on policy implementation according to Edward III, namely communication, resources, disposition/executive officers, bureaucratic structure.

Keywords: Social inequality, Implementation, Policy

Abstrak

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dimasyarakat yang mengakibatkan adanya suatu perbedaan yang mencolok antara masyarakat satu dan masyarakat yang lain, maka pemerintah sedang berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Informan penelitian merupakan subjek yang paham informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. . Kemudian dianalisis sesuai data tentang implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/petugas pelaksana, struktur birokrasi.

Kata Kunci: Kesenjangan Sosial, Implementasi, Kebijakan

PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dimasyarakat yang

mengakibatkan adanya suatu perbedaan yang mencolok antara masyarakat satu dan masyarakat yang

lain, maka pemerintah sedang berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia saat ini melalui beberapa program yang dikeluarkan dan diatur oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya Undang-Undang tersebut perlu di evaluasi terkait dengan pelaksanaannya karena fenomena yang ada banyak kita jumpai di negara Indonesia saat ini.

Untuk mengatasi fenomena tersebut pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa kegiatan atau program yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yang dikeluarkan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu dalam rangka mendukung SNKI sesuai dengan Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Nurafia et al., 2020). Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang

diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya.

Para penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) tidak hanya peserta program keluarga harapan (PKH) saja. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain- lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik terdapat sistem Saving account dan e-Wallet/dompot elektronik, sehingga peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan

kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada PERPRESRI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Peraturan presiden republik indonesia nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai : bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi (Fadlurrohim et al., 2020).

Sumber data dan penerima bansos pangan 7 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Pangan adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan Sumber Data KPM Bansos Pangan adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

(DT-PPFM), yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015 DT-PPFM dikelola oleh: Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data), yang dibentuk melalui SK Mensos No. 284/HUK/2016 tanggal 21/9/2016, yang diperbaharui melalui SK Mensos No.30/HUK/2017 tanggal 16/3/2017. Pokja Data terdiri dari: Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemensos, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat TNP2K. siklus pengelolaan data KPM BPNT (periode bulanan) : 1. Daerah melakukan verifikasi data KPM 2. Daerah melakukan pemeriksaan dan Finalisasi Data 3. Pusdatin memberikan data hasil verifikasi SIKS-NG ke PFM 4. PFM mengesahkan dan memberikan data ke Bank 5. Pembukaan Rekening dan Penyaluran Bansos. 1. Dapat dilaksanakan setiap bulan 2. Daerah dapat menonaktifkan KPM dan mengganti dengan usulan baru (usulan baru harus dari BDT) 3. Pada versi 2, daerah dapat mengusulkan peserta BDT baru tetapi baru bisa diusulkan sebagai penerima Bansos setelah kepesertaan BDTnya disahkan pada periode Mei-November(kementrian sosial, 2019).

Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memutuskan untuk

penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara tunai. Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia untuk pendistribusiannya. Penyaluran BPNT secara tunai diperuntukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Januari-Maret 2022. Tiap KPM akan menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan. Politisi PDI Perjuangan dari Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) itu menambahkan, melalui percepatan penyaluran BPNT secara tunai, para KPM akan mendapatkan total bantuan senilai Rp600 ribu (Fajarcirebon et al., 2023).

Fenomena Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng dalam tahap pengimplementasian masih terdapat permasalahan, bahwasanya masih diemukan masyarakat yang seharusnya menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetapi fakta dilapangannya mereka tidak menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu terjadilah kecemburuan sosial karena tidak tepatnya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penelitian ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu dari Indonesia tentang implemetasi kebijakan program bantuan pangan

non tunai di Indonesia sebagai berikut : (1) Penelitian dari Kuni Nabila, (2021), Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember; (2) Penelitian dari Eko Yudianto Yunus, (2019), Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo; (3) Penelitian dari Syeni, (2022), Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur; (4) Penelitian dari Titis, (2022), Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Desa Duren Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

Menurut James E. Anderson, bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan permasalahan tertentu. Sehingga kebijakan publik merujuk pada keinginan penguasa atau pemerintah. Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakann pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai kontituen pemerintah. Dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga komponen utama yaitu

society (masyarakat), political system (sistem politik), dan publik policy (kebijakan publik) yang mana ketiga komponen ini saling berkesinambungan. Kebijakan publik menjadi rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintahan.

Manurut Dunn (dalam buku yang berjudul **“Pengantar analisis kebijakan publik”** yang diterbitkan pada tahun 2000 di Yogyakarta) implementasi kebijakan adalah tahapan strategi yang dilakukan setelah adanya proses perumusan suatu kebijakan, dikarenakan suatu kebijakan akan diuji, baik substantif ataupun efektifitas penggunaannya. Menurut Edwards III pendekatan masalah implementasi kebijakan dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi. Komunikasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan sehingga mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan dengan perintah atasan terhadap pelaksana kebijakan.

Urgensi penelitian ini adalah belum adanya penelitian terkait

implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai di Kabupaten Cirebon. Sehingga bisa menjadi rujukan ataupun referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan program bantuan pangan non tunai di tingkat daerah kabupaten/kota. Berdasarkan uraian di atas bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai di Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug?. Memiliki tujuan yaitu ingin mengetahui implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai di Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

KONSEP TEORI

1. Kebijakan Publik

Menurut Adiwisastra dalam Tachjan (2006:11) keberhasilan implementasi kebijakan publik memerlukan pendekatan top-down dan bottom-up sekaligus. Pendekatan top-down terutama berfokus pada ketersediaan unit pelaksana (birokrasi), standar pelaksanaan, kewenangan, koordinasi, dan lain-lain.

Pendekatan bottom-up menekankan pada strategi-strategi yang digunakan oleh pelaksana saat menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik sebagai dasar untuk memahami kebijakan publik itu secara keseluruhan.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III terdapat indikator dalam keberhasilan komunikasi meliputi (1) Komunikasi transmisi, merupakan penyaluran komunikasi yang berdampak baik berdampak pada implementasi yang baik; (2) Komunikasi kejelasan, merupakan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan; (3) Komunikasi konsisten, merupakan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten. Selain itu, terdapat beberapa indikator untuk keberhasilan sumber daya meliputi: (1) Sumber daya manusia; (2) Sumber daya anggaran; (3) Sumber daya peralatan; (4) Sumber daya kewenangan. Kemudian terdapat indikator untuk keberhasilan disposisi atau sikap pelaksana meliputi: (1) pengangkatan birokrat; (2) insentif. Selanjutnya terdapat indikator dalam keberhasilan struktur organisasi ialah (1) Standars oprasionation procedure (SOP); (2) fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab.

3. Program

Menurut Abadi dalam Jones mengatakan bahwa yang dimaksud dengan program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, pemberian tugas, langkah-langkah yang diambil, sumber-sumber yang dimanfaatkan dan elemen-elemen yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu. Program ini biasanya dijabarkan dan dirincikan dalam sebuah proyek-proyek yang didukung oleh anggaran namun sebaik apapun program tanpa adanya implementasi tidak akan mungkin sasaran atau tujuan yang dikehendaki akan tercapai (Robert & Brown, 2004).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian yang dideskripsikan dengan menggunakan bahasa dan kata-kata (Nabila et al., 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Penentuan informan penelitian dengan snowball *sampling*, Kepala Puskesmas, Rukun Warga (RW) sebagai informan utama dan masyarakat penerima program BPNT di Desa Jatiseeng Kecamatan

No	Dusun	2023
1	Wage	115
2	Puhun	23
3	Mais	49
4	Pon	45
5	pahing	79
	Jumlah	311

Ciledug Kabupaten Cirebon sebagai informan tambahan, bahwa Informan penelitian merupakan subjek yang paham informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Kemudian dianalisis sesuai data tentang implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/petugas pelaksana, struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Jatiseeng ialah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Cirebon yang melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Salah satu penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Desa Jatiseeng. Berdasarkan data yang diperoleh dari data Desa Jatiseeng pada tahun 2023, Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan di beberapa Blok

atau Dusun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah penerima Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng yaitu 311 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 5 Dusun yang ada di Desa Jatiseeng dengan jumlah penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Komunikasi

Komunikasi di gunakan untuk penyamoaian informasi dari pelaksana program kepada kelompok sasaran agar tujuan dari program dapat tercapai Sosialisasi merupakan alat untuk mempermudah penyampaian informasi dengan adanya sosialisasi, maka antar pelaksana dan kelompok sasaran program tidak terjadi miskomunikasi. Didalam faktor komunikasi terdapat tiga indikator yang digunakan sebagai tolak ukur yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

- *Transmisi*

Komunikasi transmisi menjadi penyalur komunikasi yang baik dan

berdampak pada implementasi yang baik. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemerintah Desa Jatiseeng mengambil langkah strategi dalam Melakukan komunikasi untuk pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana di sampaikan pada wawancara oleh bapak Carda :

“Strategi komunikasi yang digunakan adalah (1) Kampanye media sosial: Gunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk melakukan kampanye tentang BPNT. Buat konten yang menarik, seperti gambar, video, dan infografis, untuk menjelaskan manfaat BPNT dan bagaimana cara mendaftar serta menggunakannya. Gunakan tagar yang relevan agar pesan Anda dapat ditemukan oleh masyarakat yang membutuhkan. (2) Pelatihan pendaftar: Sediakan pelatihan kepada petugas atau relawan yang akan membantu masyarakat dalam mendaftar dan menggunakan BPNT. Berikan pengetahuan yang cukup tentang program BPNT, serta berbagai pertanyaan yang sering diajukan oleh calon penerima, sehingga mereka dapat memberikan

informasi yang akurat dan membantu masyarakat dengan baik. (3) Brosur dan selebaran: Buat brosur dan selebaran yang menjelaskan secara ringkas tentang BPNT. Sebarkan brosur ini di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, kantor pemerintah, sekolah, atau tempat ibadah. Pastikan informasi kontak atau alamat pendaftaran juga tercantum di brosur tersebut”. (Wawancara dengan bapak Carda selaku Kuwu Desa Jatiseeng, 29 Juni 2023).

Dari pernyataan informan diatas diketahui “Strategi komunikasi yang digunakan adalah Kampanye media sosial: Gunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk melakukan kampanye tentang BPNT. Brosur dan selebaran: Buat brosur dan selebaran yang menjelaskan secara ringkas tentang BPNT.

- Kejelasan

Untuk itu, Kepala Puskesmas Desa Jatiseeng sebagai fasilitator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kemudian Kepala Puskesmas beserta jajarannya yang ada di Desa Jatiseeng menjadwalkan pelaksanaan

program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di setiap Dusun atau blok masing-masing. Dikarenakan Puskesmas menjadi penyelenggara program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini disampaikan pada wawancara oleh bapak Ahmad Muhammad :

“Puskesmas membuat jadwal untuk pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng yang kemudian ditulis dalam surat” (Wawancara dengan bapak Ahmad Muhammad, Kepala Puskesmas Desa Jatiseeng, 30 Juni 2023).

Selain itu, dari sisi masyarakat untuk melihat lebih jauh kejelasan berkomunikasi yang akan memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Titin :

“Informasi yang diberitahukan oleh Tim Puskesmas kepada saya begitu jelas, jadi saya tahu kapan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan siapa saja yang berhak mendapatkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).” (Wawancara dengan Ibu Titin selaku Ibu Rumah Tangga, 27 Juni 2023).

Dengan demikian, komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat desa Jatiseeng sudah sangat baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang akan mendapatkan bantuan program tersebut.

- Konsistensi

Dalam kaitannya dengan konsistensi yang bertanggung jawab pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Ahmad Muhammad :

“Tidak ada kendala pada waktu pelaksanaan registrasi, penyerahan kartu keluarga sejahtera yang pasti, waktu dan tempat pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang pasti dan tidak berubah-ubah, waktu penyaluran dana ke rekening KPM pasti, dan tahap pembelian barang pada ewarong yang menyediakan barang tidak berubah-ubah setiap bulannya dan sesuai dengan barang yang dibutuhkan oleh KPM”. (Wawancara dengan Bapak Ahmad Muhammad selaku Kepala Puskesmas Jatiseeng, Tanggal, 28 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas komunikasi, sosialisasi dan

kelompok sasaran sudah sangat baik dan tepat, sehingga bisa melancarkan program desa yang dilaksanakan.

Sumber daya

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Sumber daya pelaksanaan program BPNT dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: (1) Anggaran: Sumber daya utama yang digunakan untuk melaksanakan program BPNT adalah anggaran negara yang dialokasikan khusus untuk program tersebut. Pemerintah menyiapkan dana dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membiayai program BPNT, termasuk pendanaan untuk operasional, penyaluran bantuan, dan infrastruktur yang diperlukan. (2) Institusi Pelaksana: Program BPNT dilaksanakan melalui kerja sama antara beberapa institusi terkait. Dalam hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki peran penting sebagai koordinator utama program. Kemensos bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga dan pihak terkait lainnya. (3) Infrastruktur Teknis: Program BPNT membutuhkan infrastruktur teknis untuk mendukung pelaksanaan yang

efektif. Ini termasuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan database yang mengelola data penerima manfaat, pembuatan kartu elektronik yang digunakan untuk transaksi bantuan, serta jaringan komunikasi dan teknologi yang diperlukan untuk menghubungkan berbagai pihak terkait. (4) Sumber Daya Manusia: Untuk menjalankan program BPNT, diperlukan sumber daya manusia yang berkualifikasi dan terlatih. Ini termasuk petugas di tingkat pusat dan daerah yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan verifikasi penerima manfaat, petugas teknis yang mengoperasikan sistem teknis, serta petugas lapangan yang membantu dan memberikan bantuan kepada penerima manfaat.

- Sumber Daya Anggaran

Selain itu, dalam sumber daya anggaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdapat sumber pendanaan. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari Pemerintahan Pusat. Hal ini disampaikan dalam wawancara oleh bapak Ahmad Muhammad :

“Anggaran dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berasal dari Pemerintahan Pusat”.

(Wawancara dengan bapak Ahmad Muhammad selaku Kepala Puskesmas Desa Jatiseeng, 2 Juli 2023).

Selanjutnya disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Tonipah :

“Kemungkinan sumber pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng sendiri dari dana Pemerintahan Pusat”. (Wawancara dengan Ibu Tonipah selaku Ibu Rumah Tangga, 2 Juli 2023).

Dengan demikian, hasil wawancara diatas dapat simpulkan bahwasanya Anggaran dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berasal dari Pemerintahan Pusat

- **Institusi Pelaksana**

Selanjutnya Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program BPNT, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan program BPNT. Hal ini disampaikan oleh bapa Ahmad Muhammad :

“Pemerintahan Desa bekerja sama dengan aparat yang terlibat seperti Dinas Sosial, Bank penyalur, Camat, Kelurahan, tenaga pendamping dan RT/RW. (Wawancara dengan

Ahmad Muhammad selaku Kepala Puskesmas, 2 Juli 2023).

Dengan demikian, kesimpulan dari wawancaran diatas institusi pelaksana pemerintahan desa melakukan kerjasama dengan aparat dan juga dinas yang terlibat.

- **Infrastruktur Teknis**

Sumberdaya dari segi fasilitas yang tersedia dan digunakan dalam pelaksanaan program BPNT sudah memadai. Hal ini disampaikan wawancara oleh bapa Ahmad Muhammad :

“Alhamdulillah di pemerintahan desa Jatiseeng pelaksanaan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan desa”. (Wawancara dengan Ahmad Muhammad selaku Kepala Puskesmas, 2 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya infrastruktur teknis di pemerintahan desa sudah memadai dari segi fasilitas.

- **Sumber Daya Manusia**

Untuk masalah Sumber Daya Manusia sering terjadi kegagalan dalam implementasi kebijakan karena tidak mencukupi dan memadai. Dalam

hal ini memiliki SDM yang baik dan berkualitas menjadi keberhasilan untuk pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Puskesmas Desa Jatiseeng membuat tim untuk melancarkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga tujuan dari program tersebut tercapai. Kemudian Puskesmas Desa Jatiseeng membuat 2 tim lapangan untuk pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ahmad Muhammad :

“Tim lapangan untuk pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dibagi menjadi 2 tim yaitu tim penyalur dan tim pendamping”. (Wawancara dengan bapak Ahmad Muhammad selaku Kepala Puskesmas Desa Jatiseeng, 2 Juli 2023).

Selanjutnya, disampaikan oleh Ibu Juhro ;

“Memang di Desa Jatiseeng ini membentuk beberapa tim untuk membantu Puskesmas dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Wawancara dengan Ibu Juhro selaku Ibu Rumah Tangga, 2 Juli 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya agar pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemerintahan desa Jatiseeng membuat beberapa tim untuk menjalankan program tersebut.

Disposisi/Petugas Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila pelaksana yang ada tidak melaksanakan kebijakan. Karena itu pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Proses penyaluran BPNT sangatlah dibutuhkan pelayanan yang baik dan sikap yang ramah dari pihak pelaksana kepada KPM (Mufatiroh et al., 2021).

Implementor bahwa pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik, karena para pelaksana tersebut sudah paham akan tugas dan fungsinya para petugas pelaksana program sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, semua pelaksana yang terlibat sudah menjalankan sudah menjalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hal tersebut disampaikan

dalam wawancara oleh bapak Ahmad Muhammad :

“Alhamdulillah para pelaksana sudah paham akan tupoksinya masing-masing terkait pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kemudian masyarakat juga sudah cukup jelas tentang informasi program tersebut.”. (Wawancara dengan bapak Ahmad Muhammad selaku Kepala Puskesmas Desa Jatiseeng, 3 Juli 2023).

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Euis :

“Alhamdulillah Pemerintah Desa dan tim Puskesmas di Desa kami Amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas terutama pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga tidak merasa tida ada penghambat dalam pencairan”. (Wawancara dengan Ibu Euis selaku Ibu Rumah Tangga, 3 Juli 2023).

Dengan demikian hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya sikap pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng sudah cukup baik, sehingga masyarakat penerima

bantuan merasa puas terhadap petugas pelaksana.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam pedoman program. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak keluar dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Fungsi SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebagai dasar hukum pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai informasi untuk tim lapangan

dan sebagai tolak ukur kedisiplinan tim lapangan dalam menjalankan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

- Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP)

Berdasarkan Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bansos 2023 non tunai (BPNT) diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Hal disampaikan dalam wawancara oleh bapak Carda :

“Untuk SOP kita mengacu pada aturan yang telah dikeluarkan pemerintahan pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Sehingga pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon sesuai dengan SOP yang tertuang dalam keputusan Peraturan Presiden”. (Wawancara dengan bapak

Carda selaku Kuwu Desa Jatiseeng, 5 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya pemerintahan desa Jatiseeng untuk masalah standart operation procedur (SOP) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bansos 2023 non tunai (BPNT).

- Struktur Birokrasi

Aspek kedua adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara oleh bapak Carda :

“Pemerintah Desa Jatiseeng hanya bertugas sebagai fasilitator yang memonitori dalam hal proses pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng”. (Wawancara dengan bapak Carda selaku Kuwu Desa Jatiseeng, 5 Juli 2023).

Selain itu, dari bapak Ahmad Muhammad :

“Pemerintah Desa Jatiseeng hanya memfasilitasi dan memonitori pelaksanaan program Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng". (Wawancara dengan bapak Ahmad Muhammad selaku Kepala Puskesmas Desa Jatiseeng, 5 Juli 2023).

Kemudian, diungkapkan oleh Ibu Carinah :

"Puskesmas sebagai pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terjun ke lingkungan masyarakat secara langsung". (Wawancara dengan Ibu Carinah selaku Ibu Rumah Tangga, 5 Juli 2023).

Dengan demikian, hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya Standart Operation Procedur dan struktut birokrasi di Desa Jatiseeng berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng berjalan dengan baik. Selain itu, peneliti menyimpulkan dari beberapa indikator implementasi kebijakan ialah: Pertama, Komunikasi yang diterapkan oleh penyelenggara program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jatiseeng dilakukan secara sistematis (suatu usaha untuk merumuskan sesuatu bertujuan untuk

membentuk sistem yang utuh) dan massive (besar-besaran atau menyeluruh) baik itu komunikasi transmisi, dan komunikasi konsistensi. komunikasi antar organisasi yaitu Pertama telah terjadi proses komunikasi kebijakan dari pihak pelaksana kepada Keluarga Penerima Manfaat. Kedua proses komunikasi yang disampaikan oleh pendamping program kepada Keluarga Penerima Manfaat telah memenuhi unsur kejelasan.

Kedua, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Sumber daya pelaksanaan program BPNT dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: (1) Anggaran: Sumber daya utama yang digunakan untuk melaksanakan program BPNT adalah anggaran negara yang dialokasikan khusus untuk program tersebut. Pemerintah menyiapkan dana dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membiayai program BPNT, termasuk pendanaan untuk operasional, penyaluran bantuan, dan infrastruktur yang diperlukan. (2) Institusi Pelaksana: Program BPNT dilaksanakan melalui kerja sama antara beberapa institusi terkait. Dalam hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki peran penting sebagai koordinator utama program. Kemensos

bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga dan pihak terkait lainnya. (3) Infrastruktur Teknis: Program BPNT membutuhkan infrastruktur teknis untuk mendukung pelaksanaan yang efektif. Ini termasuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan database yang mengelola data penerima manfaat, pembuatan kartu elektronik yang digunakan untuk transaksi bantuan, serta jaringan komunikasi dan teknologi yang diperlukan untuk menghubungkan berbagai pihak terkait. (4) Sumber Daya Manusia: Untuk menjalankan program BPNT, diperlukan sumber daya manusia yang berkualifikasi dan terlatih. Ini termasuk petugas di tingkat pusat dan daerah yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan verifikasi penerima manfaat, petugas teknis yang mengoperasikan sistem teknis, serta petugas lapangan yang membantu dan memberikan bantuan kepada penerima manfaat.

Ketiga, disposisi atau petugas pelaksana di Desa Jatiseeng dengan Implementor bahwa pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug yang nantinya dapat mencapai tujuan

Diterbitkan oleh FISIP UMC

dengan baik, karena para pelaksana tersebut sudah paham akan tugas dan fungsinya para petugas pelaksana program sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, semua pelaksana yang terlibat sudah menjalankan sudah menjalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Keempat, Struktur dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahwasanya Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam pedoman program. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Berdasarkan Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bansos 2023 non tunai (BPNT) diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurafia, A., Yulianti, R., & Arenawati, A. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 4(2), 780–792.
<https://doi.org/10.31506/jipags.v4i2.8709>
- Fadlurrohimi, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). *Share : Social Work Journal*, 9(2), 122.
<https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>
- kementrian sosial. (2019). Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Tunai. *Kemensos.Go.Id*, 51.
<https://kemensos.go.id/uploads/to pics/15664651387355.pdf>
- Mufatiroh, E., Ratnawati, S., & Ananda Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sumpatkecamatan Driyorejo. *Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 151–158.
<https://doi.org/10.55499/intelektu>
- Nurafia, A., Yulianti, R., & Arenawati, A. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 4(2), 780–792.
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(2), 303–309.
<https://doi.org/10.19184/jpe.v15i2.21327>
- Nugroho, D., Haris, S., & Irfan, A. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 89–103.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2456>

<https://doi.org/10.31506/jipags.v4i2.8709>

Fajarcirebon.com. (2023, 4 Juli)
Kemensos Salurkan B

PNT Secara Tunai. Diakses Pada
Tanggal 4 Juli 2023
<https://fajarcirebon.com/kemensos-salurkan-bpnt-secara-tunai/>